

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN INPRES SD
DI KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA**



BOSOWA

Oleh

NURYADI RAZAK

STB : 4587020306

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi**

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1993

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Sabtu / 9 April 1993/1994
N a m a : Nuryadi Razak
Nomor Stb / NIRM : 4587020306 / 881130737
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Inpres
SD. Di Kecamatan Bontotiro
Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba.

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Administrasi
Negara.

Pengawas Umum

Dr. H. A. Zainal Abidin Faried
(Prof. Mr. H. A. Zainal Abidin Faried) (Prof. Drs. H. Sadly AD. MPA)

Rektor Universitas "45" Dekan Fisipol Unhas

Panitia Ujian

Guntur Karnaeni
Drs. GUNTUR KARNAENI.

K e t u a

Suparman Mekkah.p
Drs. Suparman Mekkah.p

S e k r e t a r i s

Tim Penguji

1. Drs.H.Mohammad Thala
2. Drs.A.Syamsuddin, MS.
3. Drs.M.Tjadi Aman
4. Drs.A.Rachman Hasan

[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

J u d u l S k r i p s i : Implementasi Program Bantuan
Inpres SD. Di Kecamatan
Bontotiro Kabupaten Daerah
Tingkat II Bulukumba.

Nama Mahasiswa : Nuryadi Razak

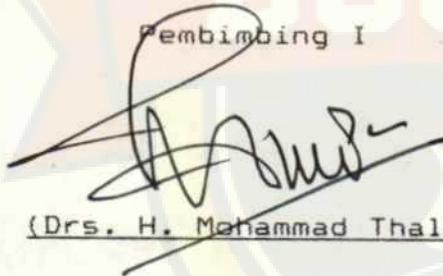
S t b : 4587020306

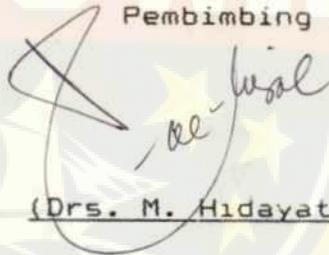
Disetujui untuk diajukan pada tanggal 9 April 1993.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. H. Mohammad Thala)


(Drs. M. Hidayat Ismail)

Mengetahui,

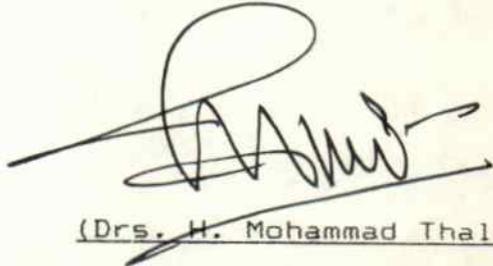
Dekan FISIPOL

Ketua Jurusan

Universitas "45"

Ilmu Administrasi


(Drs. Guntur Karnaeni)


(Drs. H. Mohammad Thala)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iiv
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	5
E. Sistimatika Pembahasan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Beberapa Pengertian	8
B. Faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi	11
C. Efisiensi Program Bantuan	13
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Keadaan Geografis	16
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	21
C. Keadaan Sarana Pendidikan dan Ban- tuan Inpres SD	29

D. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bontotiro	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Proses Implementasi	50
B. Hasil Implementasi	55
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Dalam Proses penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan tantangan dijumpai, namun berkat ketabahan dan ketangguhan penulis, serta dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kesulitan dan tantangan tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sitingginya utamanya kepada :

1. Bapak Prof.Mr.Dr. Sainal Abidin Farid. Selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Thala, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulisan ini.
4. Bapak Drs. M. Hidayat Ismail, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 01	: Luas Wilayah Kecamatan Bontotiro pada tiap Desa/Kelurahan tahun 1993	17
TABEL 02	: Prosentase Keadaan Tanah di Kecamatan Bontotiro tahun 1993	19
TABEL 03	: Luas Wilayah Berdasarkan Pemanfaat Lahan, Tahun 1993	20
TABEL 04	: Klasifikasi Penduduk Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontotiro, tahun 1992	23
TABEL 05	: Kepadatan Penduduk Wilayah Kecamatan Bontotiro tahun 1992	24
TABEL 06	: Klasifikasi Penduduk Kecamatan Bontotiro Menurut Umur tahun 1992 ...	25
TABEL 07	: Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan tahun 1992	27
TABEL 08	: Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Bontotiro, tahun 1992	28
TABEL 09	: Sarana Pendidikan di Kecamatan Bontotiro tahun 1992	30
TABEL 010	: Klasifikasi Sarana Pendidikan Menurut Status dan Penyebaran Pada tiap Desa/Kelurahan tahun 1992	31
TABEL 011	: Proyeksi Dana Bantuan Inpres SD untuk Tiap Proyek di Kecamatan Bontotiro Tahun Anggaran 1988/1989 s/d 1992/1993	34

TABEL 012 :	Program Bantuan Inpres SD, di Kecamatan Bontotiro, tahun 1988 s/d 1992	37
TABEL 013 :	Presentase Kenaikan Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro tahun 1988 s/d 1993	38
TABEL 14 :	pengimplementasian. Program Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Tahun 1992/1993	51
TABEL 15 :	Tanggapan Responden Mengenai Kelancaran Implementasi Program Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Tahun 1992/1993	52
TABEL 16 :	Kerjasama Pemerintah Wilayah Kecamatan warga dan Tokoh Masyarakat serta Pelaksanaan Proyek	54
TABEL 17 :	Mutu Proyek yang Dihasilkan Menurut Responden pada Desa Sample	56
TABEL 18 :	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengimplementasian Program Inpres SD menurut Responden	61
TABEL 19 :	Pengaruh Langsung Di Dalam Pelaksanaan Proyek Inpres SD di Kecamatan Bontotiro	64
TABEL 20 :	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Inpres SD Menurut Tanggapan Responden	67

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi, baik antara sektor pendidikan maupun dengan sektor-sektor lainnya, antara daerah maupun antara jenjang dan jenis pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, perlu disesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian di segala bidang serta ditingkatkan mutunya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu, maka pengembangan sarana pendidikan termasuk Sekolah Dasar (SD) perlu terus dikembangkan kerja sama antara sektor pemerintah dan sektor swasta di dalam pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan itu sendiri.

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan itu, merupakan gambaran latar belakang di dalam

pemilihan judul skripsi "Implementasi Program Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba".

Selanjutnya secara terperinci alasan-alasan, atau hal-hal yang melatar belakangi penulis sehingga memilih judul tersebut, adalah :

1. Dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan perlu tetap diperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan baik anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, menyandang cacat ataupun yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak didik berbakat perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai tingkat pertumbuhan pribadinya.
2. Bahwa Kecamatan Bontotiro yang merupakan salah satu Wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba yang berpenduduk relatif padat, maka pembangunan sarana pendidikan formal merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan wilayah tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan formal.
3. Berdasarkan perbandingan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Bontotiro dengan jumlah anak

usia Sekolah Dasar, maka pengembangan sarana pendidikan masih perlu terus dikembangkan atau diprioritaskan dalam pembangunan daerah.

Ketiga hal tersebut di ataslah yang melatar belakangi penulis, sehingga penulis menganggap perlu diadakan pengkajian melalui pembahasan secara empiris dalam bentuk skripsi, khususnya mengenai masalah Implementasi bantuan Inpres di bidang pendidikan dasar.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum dan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan di Wilayah Kecamatan.

Dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya program pembangunan, ditentukan oleh peranan pemimpin (Camat) yang mempunyai rasa tanggung jawab dan hubungannya dengan baik antara semua aparat demi kelancaran tugasnya dan menjalankan roda pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatan pembangunan serta kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan.

Sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Camat harus memimpin pelaksanaan tugas-tugas pembangunan di wilayah dan bertanggung jawab atas

tercapainya suatu penyelenggaraan administrasi pembangunan yang berdaya guna dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Mengingat bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba terdapat beberapa Wilayah Kecamatan dan salah satu di antaranya yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah Kecamatan Bontotiro.

Dalam hubungannya dengan masalah implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro maka berikut ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. ?
2. Bagaimana hasil Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro. ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Proses Implementasi program bantuan Inpres SD di Wilayah Kecamatan Bontotiro tersebut. ?

Dengan adanya pembatasan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, akan dapat dihadiri meluasnya jangkauan pembahasan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dalam pembahasan lebih lanjut.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses implementasi Program Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
2. Untuk mengetahui hasil implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

b. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dari penulis pada pihak yang membutuhkan.
2. Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu pengetahuan dan perumusan kebijaksanaan atau tujuan praktis lainnya.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi survei dengan tipe penelitian Deskriptif yang bertujuan

untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Populasi dan Sampel

- Populasi meliputi Kepala Sekolah dan Guru Inpres yang ada di Kecamatan Bontotiro, sejumlah 148 orang.
- Sampel yaitu :
 - Kepala sekolah SD Inpres 17 (tujuh belas) orang
 - Guru SD Inpres 17 (tujuh belas) orang.

Jadi jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan adalah teknik wawancara, yakni dalam pelaksanaannya digunakan panduan wawancara yaitu suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, selanjutnya jawaban dicatat oleh sipeneliti.

4. Teknik Pengolahan Data.

Data yang telah dikumpulkan dari para responden mula-mula diklasifikasikan, kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel-tabel frekwensi/ persentase, agar mudah dianalisa secara dekriptif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistimatikanya pembahasan skripsi ini, maka dibagi kedalam bab pertama sampai bab lima berikut ini :

Bab Pertama, Pendahuluan, dalam bab ini termasuk yang diuraikan di dalamnya adalah Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, yang meliputi : Beberapa Pengertian (Pengertian Implementasi dan Pengertian Program), Tahap-Tahap Implementasi, serta Efisiensi Program Bantuan.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Lokasi Penelitian di dalam pembahasan ini dibahas mengenai Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi, Keadaan Sarana Pendidikan, Efisiensi Program Bantuan.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan di dalamnya dibahas mengenai Implementasi program Bantuan Inpres SD, Hasil Implementasi program Bantuan Inpres SD, Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Inpres SD.

Bab Kelima, adalah Kesimpulan dan Saran-saran yang sekaligus merupakan Bab Penutup dari keseluruhan materi skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Implementasi

Pada dasarnya Implementasi dapat diartikan sebagai perwujudan daripada suatu proses kegiatan yang telah dilaksanakan.

Arti implementasi tersebut di atas, sejalan dengan pengertian Implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa :

"Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau perwujudan" W.J.S. Poerwadarminta; (1987 : 62).

Dalam kaitannya dengan pengertian Implementasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia itu, Maka untuk mendapatkan suatu batasan definisi mengenai Implementasi berikut ini dikutip beberapa pendapat Sarjana di antaranya adalah :

"...Proses Implementasi program kebijaksanaan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah program atau kebijaksanaan ditetapkan, yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari

program (kebijaksanaan) yang ditetapkan semula "Syukur Abdullah (1988 : 9).

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut disimpulkan pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses Implementasi, sebagai berikut :

1. Proses Implementasi program kebijaksanaan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijaksanaan ditetapkan) langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program (kebijaksanaan) yang ditetapkan semula.
2. Proses Implementasi dalam keadaan yang sesungguhnya dapat berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari hasil atau wujud yang dicapai.
3. Proses Implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting, yakni program, target dan unsur pelaksanaan" Syukur Abdullah (1988 : 10).

Jadi dengan demikian, maka jelaslah bahwa unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Implementasi dari suatu kebijaksanaan adalah meliputi tiga unsur yakni program, target dan pelaksanaan atau realita daripada kebijaksanaan itu sendiri, jadi dengan demikian setiap implementasi di dalamnya sasaran yang ingin dicapai.

2. Pengertian Program

Penggunaan istilah program dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai yang dirangkaikan

dengan kata kerja (program kerja) namun demikian banyak kalangan masyarakat yang menyamakan antara pengertian perencanaan dengan pengertian istilah program ini. Namun sesungguhnya kedua istilah tersebut di atas mempunyai perbedaan.

Kedua istilah tersebut di atas penggunaannya dibedakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1981 : 13) penggunaan istilah program dan perencanaan, dibedakan yakni :

"Istilah program digunakan sama dengan istilah rencana, sebagaimana rumusannya berikut ini :

- The plan is a programme for the strategy of national government in a playing a system of staat interference with the play of the market forces.

Selanjutnya Bintoro Tjokroamidjojo (1981 : 12)

memberikan pengertian bahwa :

"Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Bertitik tolak dari kedua rumusan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa istilah program berbeda dengan istilah perencanaan (planning), namun program sama dengan rencana atau plan. Oleh sebab itu untuk memperjelas pengertian program atau rencana ini selanjutnya oleh

Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah (1981: 57) di dalamnya disebutkan bahwa :

"Program adalah merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan demikian, sesuai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah merupakan rincian kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna tercapainya tujuan. Atau dengan kata lain bahwa program atau rencana adalah merupakan perincian dari para perencanaan. Oleh sebab itulah maka pada dasarnya pengertian dapat dianggap lebih bersifat operasional dari pada pengertian definisi perencanaan..

B.-Faktor yang berpengaruh dalam Implementasi

Menurut Werwick, sebagaimana yang dikutip di dalam makalah pada Temu Kaji Nasional Persadi oleh H.M. Sykur Abdullah (1988 : 17) mengemukakan bahwa :

"Dalam tahap Implementasi program, terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek, yaitu :

- a. Faktor Pendorong
- b. Faktor Penghambat.

Adapun kedua faktor yang dimaksudkan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan tahap Implementasi yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1). Faktor Pendorong

Adapun yang termasuk faktor pendorong di dalam tahap implementasi adalah seperti :

- Komitmen Pimpinan Politik

Dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintahan di daerah dalam proyek Inpres, karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.

- Kemampuan Organisasi

Dalam tahap implementasi program atau proyek pada hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

- Komitmen para pelaksana

Sering kali asumsi terbukti keliru, bahwa. Jika Pimpinan telah siap untuk bergerak bawahan akan segera ikut.

- Dukungan dari kelompok kepentingan

Pelaksanaan program dan proyek pembangunan,

sering lebih berhasil bila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan proyek-proyek tersebut.

2). Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam tahap-tahap implementasi meliputi :

- Banyak Implementasi yang terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) program itu sendiri.
- Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda sebagaimana pada kasus-kasus yang terjadi dalam tahap implementasi program itu.
- Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri.
- Jenjang Pengambilan Keputusan yang terlalu banyak
- Waktu dan perubahan kepemimpinan, makin panjang yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan.

C. Efisiensi Program Bantuan

Sebelum diuraikan lanjut mengenai efisiensi program bantuan, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian efisiensi itu sendiri.

Secara singkat efisiensi dapat diartikan sebagai sesuatu hasil terbaik yang diperoleh melalui pengorbanan yang seminimal mungkin. Pengertian efisiensi ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

"...Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara hasil dan pengorbanan. Sering juga disebut perbandingan terbaik antara out put dan input" The Liang Gie, (1967 : 15).

Karena suatu usaha itu untuk mencapai suatu tujuan memerlukan pengorbanan. Selanjutnya pengertian efisiensi, juga disebutkan dalam buku Manajemen Kepegawaian di Indonesia, seperti berikut ini :

"Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan out put antara daya usaha dan hasil usaha atau antara pengeluaran dan pendapatan, atau dengan kata lain ... Efisiensi segala sesuatu yang dikerjakan dapat berdaya guna artinya adalah segala sesuatu dikerjakan atau diselesaikan dengan : Tepat, Cepat, Hemat dan Selamat" Musanef (1986 : 22).

Pada bagian akhir definisi efisiensi sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan :

- a) Tepat, artinya kena sasaran atau apa yang dikehendaki tercapai, atau apa yang dicita-citakan menjadi nyata (realitas).
- b) Hemat, artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun.



c) Cepat, artinya tidak menhabiskan waktu yang tidak perlu, selesai pada waktu yang ditetapkan.

d) Selamat, artinya segala sesuatu sampai kepada tujuan yang dimaksud, tanpa mengalami hambatan-hambatan kelambatan, kemacetan-kemacetan.

Dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud efisiensi sebagaimana definis tersebut diatas, adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tepat, hemat, dan selamat. Jadi apa bila ada usaha yang tidak memiliki unsur yang dimaksud ini, maka tidak dapat dianggap usaha yang efisien atau dengan kata lain, bahwa apabila program bantuan Inpres yang disalurkan oleh pemerintah dalam pembangunan proyek Sekolah Dasar Inpres yang tidak memiliki unsur tersebut diatas, dalam implementasinya maka program bantuan inpres SD itu tidak dapat dikategorikan bantuan program yang efisien.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Wilayah Kecamatan Bontotiro terletak sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dan terletak \pm 14 kilometer dari pusat Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

Kecamatan Bontotiro adalah merupakan salah satu wilayah yang ada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Herlang.
- (b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonto Bahari.
- (c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Bone.
- (d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Bulu.

Dari letak Wilayah Kecamatan Bontotiro, tersebut, maka dapat diketahui bahwa Wilayah Kecamatan ini berada di pesisir Laut Bone.

2. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Bontotiro mempunyai luas wilayah 346,52 Km² yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

Berdasarkan keseluruhan luas wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagaimana dikemukakan di atas, adapun perincian luas wilayahnya pada masing-masing desa/kelurahan adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 01
Luas Wilayah Kecamatan Bontotiro pada . tiap Desa/Kelurahan tahun 1993.

No.	Kelurahan/Desa	Luas / Km ²
1.	Kelurahan Ekatiro	43,31
2.	Desa Dwitiro	42,15
3.	Desa Tritiro	46,97
4.	Desa Caramming	39,42
5.	Desa Batang	40,18
6.	Desa Tammalanrea	42,98
7.	Desa Bontotangnga	46,52
8.	Desa Bontobarua	44,98
	J u m l a h	346,51

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Berdasarkan tabel pertama di atas, yang menunjukkan bahwa luas Wilayah Kecamatan Bontotiro seluas 346,51 Km² yang diproyeksikan menurut luas masing-masing Desa/Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan tersebut, dari proyeksi inilah tampak bahwa Desa Tritiro adalah merupakan desa yang paling luas dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Bontotiro. Sedangkan desa yang paling sempit Wilayahnya adalah Desa Caramming, yang hanya mempunyai luas 38,42 Km².

3. Keadaan tanah dan Pemanfaatannya

a). Keadaan Tanah

Wilayah Kecamatan Bontotiro yang berada di pesisir pantai dan sekaligus diapit oleh pengunungan mengakibatkan keadaan tanah di wilayah ini bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi.

Akibat daripada keadaan tanah Wilayah Kecamatan tersebut, mengakibatkan wilayah ini cocok untuk areal perkebunan, pertanian dan perikanan. Untuk lebih jelasnya adapun keadaan tanah di Kecamatan Bontotiro adalah sebagai berikut :

TABEL 02

Prosentase Keadaan Tanah di Kecamatan Bontotiro Tahun 1993.

No.	Klasifikasi	Prosentase (%)
1.	Bergunung-gunung	21 %
2.	Berbukit-bukit	17 %
3.	Datar	62 %
	J u m l a h	346,51

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Dari hasil prosentase keadaan tanah yang ada di Kecamatan Bontotiro di atas, terdapat bahwa keadaan tanah yang paling banyak dijumpai adalah tanah datar yaitu sebanyak 62 % dari jumlah keseluruhan Wilayah Kecamatan Bontotiro. Sedangkan yang berbukit-bukit dan yang bergunung-gunung adalah antara 17 % sampai dengan 21 % dari keseluruhan Wilayah.

Dengan keadaan tanah sebagaimana dimaksudkan pada tabel tersebut, jelas akan turut berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di wilayah itu sendiri.

b). Pemanfaatan Lahan

Seaimana telah diuraikan pada point pertama di muka bahwa dengan keadaan tanah yang dimiliki suatu wilayah akan dapat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Hal ini terutama disebabkan karena dari pemanfaatan lahan itu sendiri atau dengan kata lain pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan keadaan geografis tanah yang ada.

TABEL 03
Luas Wilayah Berdasarkan Pemanfaatan Lahan,
Tahun 1993.

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas (ha)
1.	Tanah Sawah	898
2.	Tanah Kering	3.109
3.	Tanah Basah	97
4.	Tanah Hutan	1.215
5.	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	11
6.	Pekarangan/Pemukiman	784
7.	Lain-lain	4

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Dari keseluruhan pemanfaatan wilayah Kecamatan Bontotiro tersebut didominasi oleh tanah kering, sehingga dengan demikian sangat cocok di wilayah ini dikembangkan perkebunan, karena didukung tersedianya lahan kering dan hutan yang cukup memadai, di samping itu pula lebih tepat dikembangkan pertanian tanaman pangan yang disebabkan karena adanya pula lahan persawahan yang tersedia.

B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

1. Keadaan Penduduk

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Bontotiro adalah mayoritas suku Bugis dan Makassar, sehingga dengan demikian dialek bahasa masyarakatnya dipengaruhi oleh dua bahasa yaitu bahasa Bugis dan Makassar. Hal ini adalah merupakan salah satu aspek penduduk Kecamatan Bontotiro yang keseluruhannya sampai Bulan Januari 1993 adalah sebanyak 23.648 orang.

Untuk lebih jelasnya adapun perincian penduduk kecamatan Bontotiro, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

a). Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Menurut jenis kelamin penduduk Kecamatan Bontotiro, adalah sebagai berikut :

- Laki-laki sebanyak : 10.024 orang
- Perempuan sebanyak : 13.624 orang

Jumlah : 23.648 orang

Jadi, berdasarkan jenis kelamin penduduk Kecamatan Bontotiro tersebut di atas, didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

b). Penduduk Menurut Penyebarannya

Penyebaran jumlah penduduk Kecamatan Bontotiro, tahun 1992 adalah sangat dipengaruhi keadaan Wilayah itu sendiri, sehingga dengan demikian tidak semua Wilayah dapat dijadikan sebagai pemukiman penduduk. Oleh sebab itu penyebaran penduduk di Kecamatan Bontotiro kurang merata, hal ini tampak pada perincian penduduk tiap Desa/Kelurahan, seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 04

Klasifikasi Penduduk Tiap Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bontotiro, tahun 1992.

No	Kelurahan/Desa	Jumlah (Jiwa)
1	Ekatiro	3410
2	Dwitiro	3355
3	Tritiro	3310
4	Caramming	2596
5	Batang	2770
6	Tamalanrea	2595
7	Bontotangga	2862
8	Bonto Baru	2752
	Jumlah	23.648

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, Tahun 1993.

Penyebaran penduduk Kecamatan Bontotiro sebagaimana terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa Kelurahan Ekatiro adalah merupakan wilayah paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 3410 jiwa. Sedangkan desa yang paling kurang penduduknya adalah Desa Tammalanrea, yaitu hanya 2.595 jiwa, atau 2,34% dari jumlah keseluruhan penduduk kecamatan tersebut.

Bertitik tolak dari penjelasan tabel ke empat tersebut, maka selanjutnya dapat dihitung tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bontotiro, tahun 1992 adalah sebagai berikut:

$$\frac{23.648}{346,51} = 68,31$$

Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa setiap 1 (satu) Kilometer bujur sangkar (Km²) Wilayah Kecamatan Bontotiro didiami penduduk sebanyak 68 orang. Untuk lebih jelasnya penyebaran/kepadatan penduduk Kecamatan Bontotiro dapat diperinci tiap desa/kelurahan.

TABEL 05
Kepadatan Penduduk Wilayah Kecamatan Bontotiro
tahun 1992

No	Kelurahan/Desa	Kepadatan Penduduk per Km.
1	Kelurahan Ekatiro	79 jiwa
2	Desa Dewitiro	79 jiwa
3	Desa Tritiro	70 jiwa
4	Desa Caramming	66 jiwa
5	Desa Batang	69 jiwa
6	Desa Tamalanrea	60 jiwa
7	Desa Bontotangga	61 jiwa
8	Desa Bontobarua	61 jiwa

Sumber : Data Diolah, dari penyebaran Penduduk Kecamatan Bontotiro, tahun 1992.



Kepadatan penduduk Wilayah Kecamatan Bontotiro sebagaimana tampak di muka, terlihat bahwa Wilayah Kelurahan Ekatiro dan Desa Dwitiro adalah wilayah yang paling padat penduduknya di antara 8 (delapan) desa/kelurahan yang ada, yaitu mencapai 79 orang setiap Km².

Sedangkan desa yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Desa Tammalanrea yaitu mempunyai kepadatan penduduk rata-rata tiap Km² sebanyak 60 orang.

c). Penduduk Menurut Tingkat (klasifikasi) Umur

Adapun penduduk Kecamatan Bontotiro, berdasarkan klasifikasi tingkat usia tahun 1992 adalah :

TABEL 06
Kalsifikasi Penduduk Kecamatan Bontotiro
Menurut Umur tahun 1992.

No	Kalsifikasi Umur	Jumlah (orang)
1.	0 - 4 tahun	6.729
2.	5 - 14 tahun	7.863
3.	15 - 24 tahun	3.199
4.	25 - 54 tahun	4.102
5.	55 tahun ke atas	1.755
	Jumlah	23.648

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotimoro, tahun 1993

Pada tabel tersebut di muka dapat dilihat bahwa untuk usia 0-4 dan usia 5-14 tahun adalah merupakan jumlah penduduk yang paling dominan. Pada tabel ini pula dapat diketahui bahwa angka kelahiran pada Kecamatan Bontotiro pada tahun 1992 adalah dinilai masih cukup tinggi, berarti dengan demikian program Keluarga Berencana di daerah ini dinilai kurang berhasil, hal tersebut terbukti karena masih tingginya angka kelahiran yaitu penduduk yang berumur antara 0-4 tahun.

d). Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pada pembahasan skripsi ini yaitu masalah program bantuan Impres SD, dengan sendirinya klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan ini mempunyai arti tersendiri di dalam pembahasan analisa lebih lanjut, oleh karena antara program bantuan Impres SD dengan penduduk menurut tingkat pendidikan ini, mempunyai kaitan erat satu sama lain.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai keadaan penduduk ini maka dapat diketahui, bahwa penduduk Kecamatan Bontotiro memiliki klasifikasi tingkat pendidikan seperti berikut :

TABEL 07

Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan tahun 1992

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Buta huruf	2.118
2.	Putus Sekolah	3.768
3.	Pra Sekolah/TK	4.068
4.	Tamat SD	4.914
5.	Tamat SMTP/Sederajat	4.765
6.	Tamat SLTA/Sederajat	3.839
7.	Perguruan Tinggi	2.118
	Jumlah	23.648

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Berdasarkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka jumlah penduduk yang buta huruf, putus sekolah dan Pra Sekolah/TK masih cukup tinggi khususnya di Kecamatan Bontotiro, oleh sebab dengan keadaan yang demikian itu, diperlukan adanya jumlah sarana pendidikan yang cukup memadai guna mengatasi masalah-masalah sebagaimana dimaksudkan di atas.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bontotiro, pada dasarnya berhubungan erat dengan masalah mata pencaharian penduduknya. Sedangkan mata pencaharian penduduk itu sendiri sangat ditentukan oleh keadaan alam wilayah dimana penduduk itu berada.

Sehubungan dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Bontotiro, adalah sebagai berikut :

TABEL 08
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bontotiro,
tahun 1992

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Petani	4.577 orang
2	Nelayan	3.118 orang
3	Pedagang/Pengusaha	2.150 orang
4	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	1.843 orang
5	Purnawiran/Pensiunan PN	335 orang
6	Peternak	789 orang
7	Pengrajin	103 orang
	Jumlah	12.915 orang

Sumber Data : Papan Potensi, Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Dari keseluruhan jenis mata pencaharian penduduk Kecamatan Bontotiro, maka yang paling banyak menyerap tenaga kerja selama ini adalah sektor pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh keadaan alam wilayah di daerah itu sendiri.

C. Keadaan Sarana Pendidikan Dan Bantuan Inpres SD

Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan pendidikan formal sangat tergantung daripada tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai. sehubungan dengan itu, maka sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bontotiro pengadaannya tidak hanya ditangani oleh pihak pemerintah saja, melainkan sebahagian dari masyarakat yang ada di daerah tersebut telah ambil bagian dalam hal pengadaan sarana pendidikan ini.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bontotiro, pada akhir tahun 1992, yang terdiri dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sedangkan untuk Perguruan Tinggi sampai saat ini belum ada. TK sebanyak 8 buah, SD 28, SLTP 4, SLTA 3 buah, jumlah keseluruhan sebanyak 46 (empat puluh enam) buah.

TABEL 09
Sarana Pendidikan di Kecamatan Bontotiro
tahun 1992.

No	Jenis Sarana (Sekolah)	Jumlah (buah)
1	TK	8
2	SD	28
3	SLTP/Sederajat	7
4	SLTA/Sederajat	3
5	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	46

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bontotiro, tahun 1993.

Apabila kita perhatikan jumlah sarana sekolah yang ada di Kecamatan Bontotiro, tersebut secara keseluruhannya adalah sebanyak 46 buah, ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di daerah tersebut cukup memadai, apabila dibandingkan dengan luas wilayah termasuk jumlah desa/kelurahan yang ada, serta apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah.

Sedangkan apabila sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bontotiro diklasifikasikan berdasarkan statusnya, serta penyebarannya pada tiap desa/kelurahan, maka akan terlihat sebagai berikut :

Tabel 010: Kalsifikasi Sasaran Pendidikan Menurut Statusnya dan penyebarannya pada tiap Desa/ Kelurahan Tahun 1992.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Sekolah Menurut Status										JUMLAH
		TK		SD			SLTP		SLTP			
		S	N	S	N	INP	S	N	S	N		
1.	Ekatiro	1	-	-	2	3	1	2	-	1	10	
2.	Dwitiro	1	-	-	1	2	1	1	-	-	6	
3.	Tritiro	1	-	-	1	3	-	-	-	-	5	
4.	Caraming	1	-	-	2	1	-	-	-	-	4	
5.	Bateng	1	-	-	1	3	-	1	1	-	3	
6.	Tamalanrea	1	-	-	2	3	1	-	1	-	3	
7.	Bontotanga	1	-	-	2	3	1	-	1	-	8	
8.	Bontobarua	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	
	JUMLAH	8	-	-	11	17	3	4	2	1	46	

Pada tabel kesepuluh tersebut memperlihatkan adanya beberapa desa di Wilayah Kecamatan Bontotiro yang masih membutuhkan beberapa sarana pendidikan, seperti di antaranya desa Bontobarua yang hanya memiliki sarana pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 (satu) buah, demikian juga halnya pada Desa Tammalanrea yang hanya memiliki dua buah sekolah Dasar, hal ini akan dapat berpengaruh terhadap kesempatan belajar yang kurang bagi anak usia sekolah yang ada di desa tersebut.

Melalui tabel itupula, dapat diketahui mengenai besarnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, yaitu terbukti bahwa beberapa sekolah dikelola oleh swasta, yaitu (delapan) buah sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 28 buah sekolah Dasar 7 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan adanya Sekolah swasta yang dibina oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bontotiro tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan anak usia sekolah.

TABEL 19

Pengaruh Pengawasan Dalam Implementasi
Proyek Inpres SD di Kecamatan Bontotiro

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Prosentase
1.	Pengaruh baik	33	97,06
2.	Cukup baik	1	2,94
	Jumlah	34	100,00

Sumber data : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 1993

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengawasan perlu dilaksanakan didalam pembangunan atau pengimplementasian progr am Inpres SD di Kecamatan Bontotiro oleh karena dapat menunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini terbukti dari 34 responden yang diwawancarai 33 orang responden atau 97,06 % menyatakan berpengaruh baik dan 1 orang atau 2,94 % responden menilai cukup bermutu.

2. Faktor Yang Menghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat di dalam mengimplementasikan program Inpres SD di Kecamatan Bontotiro adalah sebagai berikut :

TABEL 011

Proyeksi Dana Bantuan Inpres SD untuk Tiap Proyek di Kecamatan
Bontotiro Tahun Anggaran 1988/1989 s/d 1992/1993.

No.	Desa/Kelurahan	Bantuan Inpres SD per Tahun Anggaran									
		1988/1989		1989/1990		1990/1991		1991/1992		1992/1993	
		Dana	Proyek	Dana	Proyek	Dana	Proyek	Dana	Proyek	Dana	Proyek
1.	Elatiro	9.567.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bwitiro	10.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tritiro	-	-	10.000.000	1	13.500.000	1	-	-	-	-
4.	Caramasing	-	-	-	-	-	-	13.150.000	1	-	-
5.	Batang	-	-	-	-	13.500.000	1	-	-	10.500.000	1
6.	Tamalanrea	-	-	-	-	-	-	-	-	11.750.000	1
7.	Bontotangga	-	-	10.000.000	1	-	-	14.040.000	1	-	-
8.	Bontobaru	-	-	-	-	-	-	-	-	10.190.000	1
J u m l a h		19.567.000	2	20.000.000	2	27.000.000	2	27.190.000	2	32.440.000	3

Sumber : Data diolah dari Anggaran Penerimaan, Kecamatan Bontotiro,
Tahun 1988/1989 s/d 1992/1993.



D. Perencanaan Pengalokasian Dana Inpres SD

Salah satu kendala pokok yang dihadapi dalam Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro adalah masalah perencanaan alokasi bantuan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat desa-desa yang seharusnya diproyeksikan untuk penambahan Sekolah Dasar oleh karena perbandingan jumlah anak usia sekolah pada desa yang bersangkutan relatif besar seperti halnya desa Bontobarua dan desa Caramming, namun karena perencanaan alokasi dana bantuan proyek Inpres SD tersebut yang kurang mantap sehingga desa-desa yang dimaksudkan ini selama lima tahun terakhir baru satu kali mendapat bantuan dana Inpres SD, itupun hanya untuk rehabilitasi gedung SD yang telah ada.

Perencanaan yang kurang mantap dalam pengalokasi bantuan proyek Inpres ini, akan dapat mengakibatkan kurang efisiennya dana Inpres itu sendiri, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dana tersebut sifatnya hanya pemborosan, oleh karena tidak dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan pada tiap-tiap desa.

Alokasi bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro selama lima tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa dalam satu tahun anggaran tidak semua desa/kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan itu dapat bantuan, melainkan desa/kelurahan yang mendapat bantuan Inpres SD tersebut adalah tidak semuanya dana digunakan untuk proyek rehabilitasi sekolah yang benar-benar dianggap tingkat kerusakannya cukup parah.

Jadi program bantuan inpres SD yang diterima oleh pemerintah Wilayah Kecamatan Bontotiro adalah sebahagian untuk proyek rehabilitasi SD atau dengan kata lain tidak semuanya dimanfaatkan untuk pembangunan proyek baru.

Untuk lebih jelasnya adapun klasifikasi proyek yang dibiayai dari bantuan dana program Inpres SD di Kecamatan Bontotiro tahun Anggaran 1988/1989 sampai dengan tahun anggaran 1992/1993, masing-masing adalah :

- Proyek baru sebanyak 3 buah
- Proyek rehabilitasi 8 buah

Dengan demikian Kecamatan Bontotiro selama lima tahun terakhir ini secara keseluruhan telah dikerjakan sebanyak 11 buah proyek Inpres SD.

TABEL 012

Program Bantuan Inpres SD, di Kecamatan Bontotiro, tahun 1988 s/d 1992.

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Bantuan
1.	1988/1989	Rp. 19.567.000,-
2.	1989/1990	Rp. 20.000.000,-
3.	1990/1991	Rp. 27.000.000,-
4.	1991/1992	Rp. 27.190.000,-
5.	1992/1993	Rp. 32.440.000,-
	J u m l a h	Rp. 126.197.000,-

Sumber Data : Daftar Isian Proyek, Kecamatan Bontotiro, tahun 1992.

Berdasarkan besarnya dana bantuan Inpres SD yang diterima Kecamatan Bontotiro selama lima tahun Anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa bantuan Inpres tersebut selama lima tahun Anggaran terus mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan proyek Sekolah Dasar yang diusulkan Pemerintah Kecamatan Bontotiro.

Adapun prosentase kenaikan bantuan dana Inpres SD di Kecamatan Bontotiro, adalah tahun Anggaran 1988/1989 mengalami kenaikan 0,9 % dari tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk tahun Anggaran 1989/1990

mengalami kenaikan sebesar 2,21 % dari jumlah dana bantuan Inpres tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun Anggaran 1990/1991 jumlah dana bantuan Inpres SD kembali mengalami kenaikan sebesar 35,00 % dari tahun Anggaran 1989/1990, untuk tahun Anggaran 1991/1992 jumlah dana bantuan mengalami kenaikan relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,70 % dari tahun Anggaran sebelumnya, selanjutnya untuk Tahun Anggaran 1992/1993 jumlah kenaikan bantuan Inpres SD adalah sebesar 19,30 % dari tahun Anggaran sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya prosentase kenaikan jumlah bantuan Inpres tersebut di atas, dapat diproyeksikan pada tabel berikut :

Tabel 013

Presentase Kenaikan Bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro tahun, 1988 s/d 1993.

No.	Tahun Anggaran	Prosentase kenaikan (%)
1.	1988/1989	0,9 %
2.	1989/1990	2,21 %
3.	1990/1991	35,00 %
4.	1991/1992	0,70 %
5.	1992/1993	19,30 %

Sumber : Data diolah dari Prosentase Kenaikan Bantuan Inpres SD.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bontotiro

Di dalam setiap organisasi baik organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan untuk menunjukkan hubungan dan wewenang antara yang satu dengan yang lainnya dalam organisasi yang bersangkutan.

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya tentang struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba maka terlebih dahulu penulis memberikan batasan pengertian struktur organisasi yang keduanya merupakan satu kaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

"Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari orang yang diberi tugas atau tanggung jawab dari setiap fungsi yang bersangkutan. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai kerangka yang menyeluruh yang menghubungkan fungsi-fungsi dari suatu badan usaha serta menetapkan hubungan-hubungan yang tetap di antara pegawai-pegawai yang melaksanakan fungsi masing-masing" (Manullang, M, 1971 : 19).

Jadi struktur organisasi memudahkan setiap pimpinan untuk mengetahui segenap tugas pekerjaan

bawahannya atau masing-masing kelompok, seksi ataupun bagian lainnya yang terendah.

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi pimpinan untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan semula.

"Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formil yang terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok yang disebut bawahan" (S.P. Siagian, 1977 : 27).

Perpaduan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka diketahuilah betapa besar manfaat penyusunan secara mantap struktur organisasi serta organisasi itu sendiri pada suatu badan/lembaga, jawatan seperti halnya Kantor Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.

Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bontotiro ditata dan disusun sedemikian rupa tiada lain untuk mencapai dan mengurus kesejahteraan rakyat pada wilayah kerjanya, Wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat II Bulukumba, serta mengurus tercapainya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun organisasi pemerintahan di Kecamatan ini merupakan basis pembangunan negara yang turut menentukan berhasil tidaknya rencana yang telah ditetapkan terutama dalam rangka tahapan-tahapan pembangunan yang lebih dikenal dengan REPELITA.

Dengan demikian, maka dirasa perlu dan amat penting untuk diadakan pembinaan administrasi pemerintahan di Kecamatan Bontotiro ini.

Untuk mengetahui secara detail struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, maka dapat dilihat pada pembahasan ini.

Struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Bontotiro berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukuma No. 11/KDB/1974, tanggal 8 Januari 1974.

Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam negeri No. 69 tahun 1973, tanggal 17 Januari 1973, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Wilayah Kecamatan, berdasarkan pasal 13 Dalam Surat Keputusan tersebut di atas, menegaskan bahwa tugas Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Administrator pemerintah, Administrator pembangunan dan kemasyarakatan adalah :

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan.
 - b). Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba.
 - c). Memegang kebijaksanaan politik poksional dalam rangka usaha memelihara ketertiban dan keamanannya dalam keadaan tertib sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati.
 - d). Melaksanakan tugas sebagai perajaksa.
 - e). Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan sipil.
 - f). Mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur-unsur Angkatan Bersenjata RI.
 - g). Bertanggung jawab atas pungutan pajak yang dibebankan kepadanya.
 - h). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan.
2. Tugas Menteri Polisi Praja.
- a. Membantu Kepala Wilayah Kecamatan di bidang tugasnya;



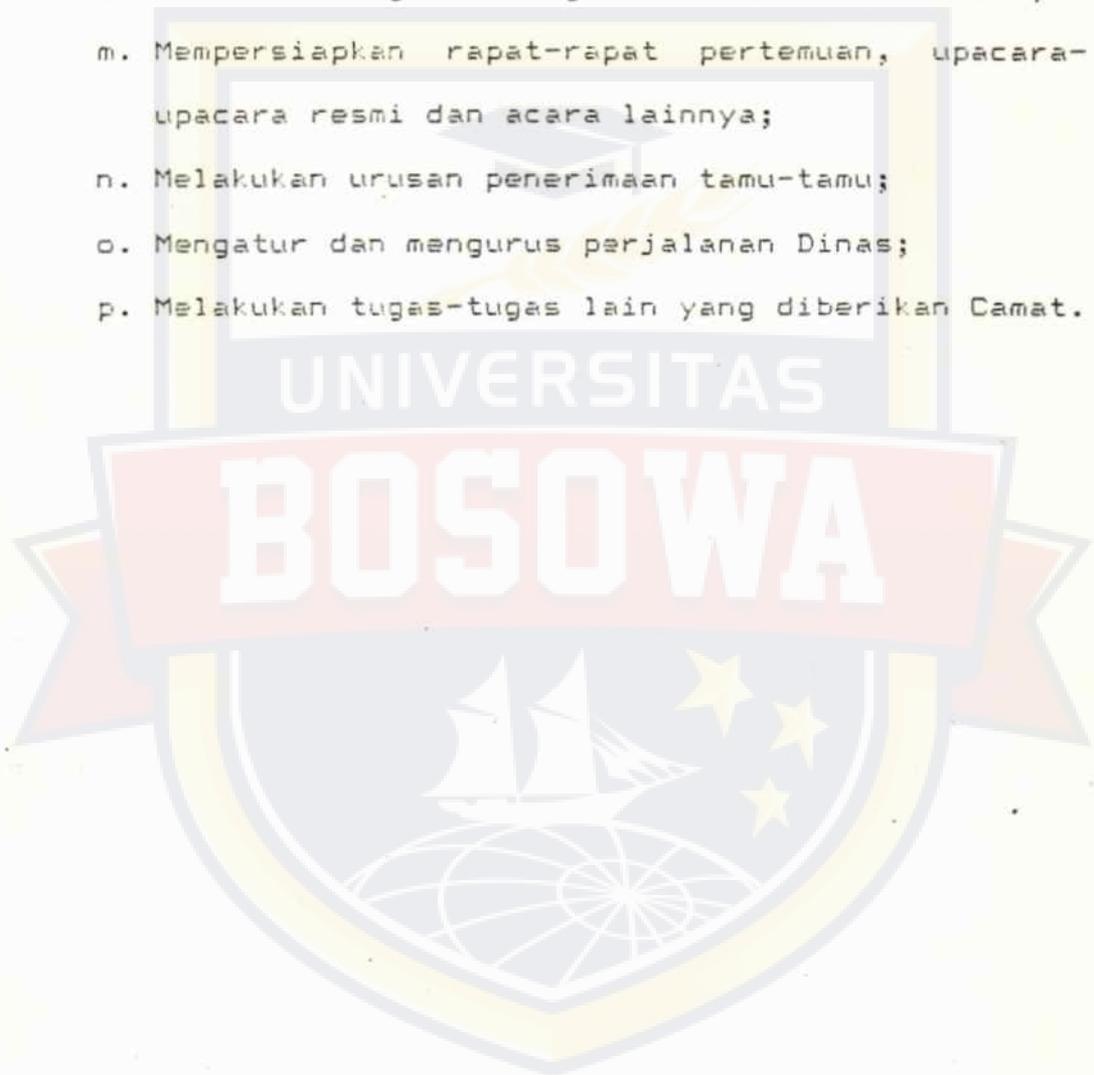
- k. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan imigrasi;
 - l. Mempersiapkan bahan-bahan guna perhitungan di dalam pemberian ganti rugi;
 - m. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
4. Urusan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mempersiapkan penyusunan program pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan dan lain-lain;
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian izin pertunjukan-pertunjukan/keramaian dan usaha sosial lainnya;
 - g. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;

- h. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, pembinaan pendidikan masyarakat serta pendidikan kesenian dan kebudayaan;
 - i. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan, kepramukaan dan generasi muda, kewanitaan, kebersihan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
 - j. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan keserasian lingkungan hidup, kelestarian alam, serta perburuhan.
 - k. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan pembinaan pendidikan.
5. Urusan Pembangunan, mempunyai tugas
- a. Mengumpulkan dan mensistematiskan serta menganalisa data pembangunan desa dan pembangunan pada umumnya;
 - b. Menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program pembangunan desa dan pembangunan pada umumnya;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan bagi masyarakat desa dan melakukan kegiatan

- dalam rangka pembinaan dan pengembangan kependudukan;
- d. Melakukan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan pembinaan penyelenggaraan lomba desa;
 - e. Melakukan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja pembangunan di Wilayah Kecamatan;
 - f. Melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa;
 - g. Melakukan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dan pembangunan pada umumnya.
 - h. Merumuskan rencana dalam rangka pemberian rekomendasi lain-lain;
 - i. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan pertambangan;
 - j. Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka pengembangan kegiatan Bimas, Insus, penghijauan dan sebagainya;
 - k. Melakukan dan membina administrasi pelaksanaan bantuan Pembangunan Pemerintahan Pusat kepada desa dan bantuan pembangunan desa yang bersumber dari pemerintahan Daerah dan Masyarakat;

- l. Memberikan petunjuk-petunjuk untuk usaha gotong royong;
 - m. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka usaha pemukiman kembali penduduk, pemugaran lingkungan dan pemugaran lingkungan desa;
 - n. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan perlistrikan desa;
 - o. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa.
6. urusan Administrasi, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan naskah laporan pemerintah wilayah;
 - b. Melakukan urusan surat menyurat;
 - c. Melakukan pengetikan dan penggandaan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang diperlukan;
 - d. Menyimpan memelihara dan menemukan kembali arsip-arsip;
 - e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mutasi pegawai (pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pindah, pensiun dan lain-lain);
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan pegawai;
 - g. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang pemerintah wilayah Kecamatan;
 - h. Mengurus dan membayar gaji pegawai;
 - i. Mengurus pembukuan keuangan;

- j. Mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- k. Merencanakan, mengadakan, memelihara dan mendistribusikan alat-alat perlengkapan;
- l. Melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor;
- m. Mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, upacara-upacara resmi dan acara lainnya;
- n. Melakukan urusan penerimaan tamu-tamu;
- o. Mengatur dan mengurus perjalanan Dinas;
- p. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil ^{analisa} Implementasi

Dalam menguraikan masalah pelaksanaan Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro, maka tidak lepas dari masalah dana Inpres itu sendiri, Sebagaimana diketahui bahwa besarnya dana bantuan Inpres untuk pembangunan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Bontotiro selama tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebanyak Rp. 32.440.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh Ribu Rupiah).

Dari jumlah dana tersebut di atas, yang pemanfaatannya dipergunakan untuk pengadaan dan pemugaran sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar yang disebut SD Inpres. Selanjutnya dari alokasi dana yang tersedia itu pemerintah daerah telah memprogramkan pengolokasiaanya sesuai kebutuhan Daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan alokasi dana bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro ini, maka dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, maka berikut ini dapat dikemukakan hasil analisa implementasi program bantuan Inpres Sekolah Dasar tersebut seperti tabel di bawah ini :

TABEL 14
pengimplementasian Program Bantuan
 Inpres SD di Kecamatan Bontotiro
 Tahun Anggaran 1992/1993

No	Tanggapan Responden	Frekuwensi	Prosentase
1.	Sesuai Program	30	88,23
2.	Cukup sesuai Program	1	2,94
3.	Tidak sesuai Program	3	2,82
	Jumlah	34	100,00

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, tahun 1993.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa dari ketiga puluh empat orang responden yang diwawancarai 30 orang di antaranya yang menilai bahwa implementasi bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba dinilai sesuai dengan Program. Sedangkan yang menilai bahwa implementasi bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro cukup sesuai dengan program adalah sebanyak 1 (satu) orang responden atau 2,94% dari jumlah keseluruhan responden yang diwawancarai, sedangkan 3 (tiga) orang di antaranya atau 8,82% dari keseluruhan responden tidak sesuai program penilaian mengenai hal ini.

Dari hasil analisa mengenai pelaksanaan Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro ini, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan Inpres SD di wilayah

Kecamatan Bontotiro dianggap sesuai program, hal ini dapat pula dibuktikan dengan melihat jumlah Proyek yang dapat diselesaikan pada tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana terlampir pada tabel yang ada pada bab ketiga.

Keberhasilan pengimplementasian program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro tersebut tidak lepas dari pada tatacara penyelesaian proyek yang diterapkan di wilayah tersebut yang cukup berpengaruh.

Sejalan dengan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka berikut ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden mengenai kelancaran pelaksanaan implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro ini, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 15
Tanggapan Responden Mengenai Kelancaran
Implementasi Program Bantuan Inpres
SD di Kecamatan Bontotiro Tahun
1992/1993

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Prosentase
1.	Lancar	30	88,23
2.	Kurang Lancar	3	8,82
3.	Tidak Lancar	1	2,94
	Jumlah	34	100,00

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, tahun 1993.

Jadi sesuai dengan tabel ini, menunjukkan mengenai bahwa program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro dalam implementasi dinilai lancar. Hal ini terbukti bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang responden yang diwawancarai 30 (tiga puluh) orang di antaranya atau 88,23% yang menilai bahwa Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro menilai bahwa Implementasi mengenai bantuan tersebut berjalan lancar.

Kelancaran daripada pengimplementasian bantuan program Inpres SD tersebut tidak terlepas dari pada adanya kerja sama yang baik dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Seperti Pemerintah Wilayah Kecamatan Bontotiro beserta aparatnya, warga dan tokoh masyarakat, serta pelaksanaan bangunan proyek Inpres SD itu sendiri. Dengan adanya kerja sama yang baik inilah di antara pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian program bantuan Inpres SD ini, memungkinkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk membuktikan kelancaran pengimplementasian program bantuan Inpres SD ini, maka berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang kerjasama yang

merupakan salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap Implementasi program bantuan Inpres SD itu.

TABEL 16

Kerjasama Pemerintah Wilayah Kecamatan
Warga dan Tokoh Masyarakat serta
Pelaksanaan Proyek

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Prosentase
1.	Baik	28	82,35
2.	Kurang baik	5	14,7
3.	Tidak baik	1	2,94
	Jumlah	34	100,00

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, tahun 1993.

Berdasarkan tabel yang dikemukakan ini, maka terlihat bahwa kerja sama antara aparat pemerintah, warga masyarakat dan tokoh masyarakat serta pelaksana proyek dalam pengimplementasian program bantuan SD Inpres di Kecamatan Bontotiro dinilai cukup baik hal ini terbukti bahwa dari ketiga puluh empat orang responden yang diwawancarai 28 (dua puluh delapan) orang diantaranya atau 82,35% yang menilai bahwa kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian program bantuan Inpres SD tersebut cukup baik.

B. Hasil Implementasi.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pengimplementasian program Inpres SD di Kecamatan Bontotiro dalam tahun anggaran 1992/1993 dan beberapa tahun anggaran sebelumnya dapat ditinjau dari beberapa sudut, antara lain :

1. Proyek yang dihasilkan

Sebagaimana telah dijelaskan pada point pembahasan bab sebelumnya bahwa jumlah keseluruhan proyek Sekolah Dasar yang dibangun berdasarkan dana yang berasal dari bantuan Inpres adalah sebanyak 11 (sebelas) buah proyek dengan perincian bahwa :

- 3 (tiga) buah proyek baru
- 8 (delapan) buah rehabilitasi SD

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara, bahwa proyek-proyek yang dikerjakan tersebut baru 80% yang telah dapat diselesaikan, sehingga dengan demikian 20% diantaranya masih dalam tahap penyelesaian.

Sedangkan mutu proyek yang dihasilkan itu sendiri, dapat diketahui pula melalui wawancara terhadap beberapa orang responden, seperti pada tabel di bawah ini :



TABEL 17

Mutu Proyek yang Dihasilkan Menurut Responden
pada Desa Sample

No	Jawaban Responden	Frekuwensi	Prosentase
1.	Bermutu	25	73,5
2.	Cukup Bermutu	4	11,7
3.	Tidak Bermutu	5	14,7
	Jumlah	34	100,00

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, tahun 1993.

Jadi dengan demikian bertitik tolak pada hasil penelitian lapangan sebagaimana dikemukakan pada tabel di atas menunjukkan bahwa proyek yang dibangun melalui dana SD Inpres ini, khususnya di Kecamatan Bontitoro dinilai bermutu, hal ini terbukti bahwa dari ketiga puluh empat orang responden yang diwawancarai sebanyak 25 orang responden atau 73,5% diantaranya yang menilai bermutu dan yang menilai cukup bermutu adalah sebanyak 4 (empat) orang atau 11,7% dari jumlah keseluruhan responden yang diwawancarai.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau pengimplementasian program bantuan Inpres SD di

Kecamatan Bontotiro telah dapat direalisasikan sesuai dengan program bantuan itu sendiri.

Guna pembuktian kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari program pembangunan proyek tersebut khusus untuk tahun anggaran 1992/1993 80% diantaranya telah dapat dirampungkan pada saat pengambilan data di lapangan, sedangkan sisa proyek yang belum selesai sampai pada bulan Pebruari adalah sebanyak 20% dan dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran 1992/1993 tersebut yakni tepatnya pada bulan Maret.

2. Penggunaan Dan Proyek

Salah satu keberhasilan yang dicapai Pemerintah Wilayah Kecamatan Bontotiro dalam kaitannya dengan pengimplementasian program bantuan Inpres SD adalah penggunaan dana proyek itu sendiri, yang benar-benar telah dapat dimanfaatkan secara maksimal, guna tercapainya tujuan dari pada proyek tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel yang ada pada bab tiga bahwa jumlah dana yang diperoleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Bontotiro yang berasal dari dana Inpres SD untuk tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebanyak Rp. 32.440.000,- dengan jumlah

proyek adalah sebanyak dengan jumlah proyek adalah sebanyak tiga buah, masing-masing proyek tersebut berlokasi di Desa Tammalanrea sebanyak satu buah proyek dengan alokasi dana adalah sebanyak Rp. 11.750.000,- sedangkan di Desa Batang jumlah dan yang dialokasikan adalah sebanyak Rp.10.500.000,- dan Desa Bontobarua adalah sebanyak Rp. 10.190.000,- masing-masing satu buah proyek. Dari hasil penelitian dari tiga Desa yang mendapat dana bantuan pembangunan SD Inpres tersebut maka dapat diketahui realisasi pemanfaatan dana tersebut masing-masing seperti berikut ini :

Desa Batang jumlah dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 10.500.000,- Desa Tammalanrea dana yang dialokasikan sebanyak, pada tahun anggaran 1992/1993 adalah Rp. 32.440.000,- dengan jumlah proyek tiga buah, sedangkan di Desa Bontobarua adalah sebanyak Rp. 10.190.000,- masing-masing satu buah proyek.

Secara keseluruhan terlihat bahwa dana yang belum dimanfaatkan secara keseluruhan adalah 8% pada Desa Tammalanrea dan sisa 2% untuk Desa Bontobarua. Adanya dana yang belum dimanfaatkan sebagaimana terlihat di atas adalah karena pada saat pengambilan data di lapangan, masih terdapat

20% proyek yang belum dapat diselesaikan oleh sebab pada dasarnya batas waktu penyelesaian proyek tersebut memang berakhir pada bulan Maret 1993.

Apabila diperhatikan pembahasan 2 (dua) poin tersebut tentang hasil implementasi program bantuan Inpres Sd di Kecamatan Bontotiro, maka dapat dianggap bahwa pelaksanaan implementasi program bantuan Inpres SD ini, dinilai cukup berhasil baik ditinjau dari mutu proyek yang dihasilkan maupun penggunaan dana proyek itu sendiri.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan Inpres SD, khususnya di Kecamatan Bontotiro dapat dikelompokkan atas dua bagian, yakni :

1. Faktor yang memperlancar

Yang termasuk faktor-faktor yang memperlancar pelaksanaan implementasi program Inpres SD wilayah ini, antara lain :

a. Faktor sosial budaya

Sebagaimana pada umumnya masyarakat Indonesia lainnya yang hidup di daerah pedesaan yang memiliki semangat gotong-royong yang tinggi dalam berbagai hal, seperti dalam pembangunan.

Pada dasarnya semangat kegotongroyongan yang telah membudaya di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Bontotiro sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan proyek dan pembangunan fisik lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaksana proyek Sekolah Dasar Inpres mengemukakan bahwa, "Kegotong royongan yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelesaian proyek. Sedangkan dari segi penghematan dana dengan adanya kegotong royongan masyarakat ini dapat memperkecil pengeluaran, terutama pengeluaran (biaya) tenaga buruh".

Partisipasi masyarakat Wilayah Kecamatan Bontotiro dalam pengimplementasian program pembangunan SD Inpres ini, tidak hanya terbatas pada masalah tenaga, melainkan juga dapat bersifat materiil seperti kesediaan sebahagian dari anggota masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penyediaan lokasi pembangunan proyek itu sendiri, sehingga dengan sendirinya dapat mempengaruhi besarnya dana yang harus

b. Faktor Pelaksanaan

Salah satu faktor yang sangat mendukung bagi terselenggaranya implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro adalah faktor pelaksana proyek itu sendiri, oleh karena pada dasarnya pelaksana proyek yang memenangkan tender adalah putra daerah sendiri, sehingga dengan sendirinya akan tetap memperhatikan mutu proyek yang dikerjakan.

c. Faktor Bahan Baku

Dengan tersedianya bahan baku yang cukup memadai pada lokasi proyek akan sangat besar pengaruhnya bagi kelancaran pengimplementasian program Inpres SD di Wilayah Kecamatan Bontotiro itu sendiri oleh karena dapat memenuhi kebutuhan proyek yang dikerjakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa 50 % kebutuhan bahan baku proyek Inpres SD diperoleh dalam Wilayah Kecamatan Bontotiro itu sendiri.

Oleh karena adanya bahan baku proyek yang diperoleh dalam wilayah Kecamatan Bontotiro itu

sendiri dapat memperlancar dan menghemat biaya transportasi pelaksanaan proyek.

d. Faktor Pengawasan.

Salah satu faktor yang sangat menunjang bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan atau pelaksanaan Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro adalah dengan adanya pengawasan yang baik dari aparat pemerintah dan warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.

Sejalan dengan uraian yang dikemukakan pada pembahasan di atas, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan pengawasan proyek ini, sangat dibutuhkan oleh karena dapat berpengaruh terhadap mutu proyek yang dikerjakan, seperti yang dikemukakan oleh sebahagian responden yang diwawancarai tentang perlu, setidaknya pengawasan ini dilakukan dalam pengimplementasian program proyek Inpres SD di kecamatan Bontotiro.

Adapun hasil wawancara yang dimaksudkan dapat dilihat pada tabel yang dijelaskan pada pembahasan berikut ini :



a). Faktor Geografis

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa letak geografis Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba khususnya Kecamatan Bontotiro yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan proyek sering kali harus dikeluarkan biaya transportasi bahan bangunan yang jauh lebih besar dibanding proyek yang dikerjakan yang pendistribusian bahan bangunannya melalui darat.

Dalam kaitannya dengan masalah transportasi bahan bangunan ini, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaksana proyek mengemukakan bahwa :

"Kecamatan Bontotiro yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan bergunung-gunung sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya proyek, oleh sebab itu pelaksanaan proyek sering terhambat".

b). Faktor Lokasi Proyek

Salah satu faktor yang biasa dijumpai dalam mengimplementasikan program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro khususnya pada

desa/Kelurahan yang dijadikan sampel adalah sulitnya ditemukan lokasi pembangunan yang potensial.

Potensial dimaksudkan di sini adalah dalam arti bahwa lokasi tersebut dekat pemukiman penduduk. Oleh karena masalah lokasi yang potensial ini, maka pengimplementasian program Inpres SD di Kecamatan Bontotiro merupakan salah satu kendala yang dinilai cukup menghambat pembangunan proyek.

Apabila diperhatikan kedua faktor penghambat tersebut di atas, dalam pengimplementasian bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro maka dapat dikatakan faktor penghambat itu hanya berasal dari faktor geografis Wilayah Kecamatan itu sendiri.

Berikut ini dapat kita lihat dari hasil wawancara oleh beberapa responden seperti pada tabel berikut ini.

TABEL 20
 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
 Program Bantuan Inpres SD Menurut
 Tanggapan Responden

No	Pengaruh	Frekwensi	Prosentase
1	Letak Geografis	21	61,76
2	Lokasi Proyek	13	38,23
	Jumlah	34	100,00

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan,
 tahun 1993.

Sesuai dengan tabel di atas terbukti bahwa Implementasi program Inpres SD di Kecamatan Bontotiro dipengaruhi oleh faktor geografi daerah. Apabila diperhatikan kedua faktor penghambat tersebut di atas dalam pengimplementasian bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro, maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat itu hanya berasal dari faktor geografis Kecamatan Bontotiro.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa Proses Implementasi program bantuan Inpres SD, mayoritas responden berpendapat bahwa pelaksanaannya sesuai dengan program, atau dengan kata lain bahwa implementasi program bantuan Inpres SD berjalan dengan lancar, baik ditinjau dari penyelesaian proyek itu sendiri maupun dari segi perencanaannya.
2. Implementasi program bantuan Inpres SD yang telah dilaksanakan khususnya di Kecamatan Bontotiro mayoritas responden berpendapat bahwa adanya kerja sama yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut, dalam hal ini pihak pemerintah, warga dan tokoh masyarakat serta pelaksana proyek (pemborong). yang ikut mendukung terlaksananya program bantuan tersebut.
3. Implementasi program bantuan Inpres SD di Kecamatan Bontotiro menunjukkan bahwa proyek yang dibangun melalui dana Inpres ini, dinilai mutu proyek yang dikerjakan cukup dari penggunaan dana bantuan yang

pemanfaatannya telah dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi program bantuan Inpres SD adalah faktor sosial budaya masyarakat di Daerah yang ikut membantu serta perkiraan waktu dan pengawasan yang ada.
5. Salah satu faktor yang Menghambat Implementasi program bantuan Inpres SD adalah faktor geografis daerah, pulau-pulau bergunung-gunung serta jalan yang dilalui proyek.

B. Saran-saran

1. Untuk lebih memperlancar pengimplementasian program inpres SD yang dananya berasal dari pemerintah, diharapkan suatu bentuk kerja sama yang baik oleh semua pihak yang terkait di dalamnya demi kelancaran daripada proyek itu sendiri.
2. Diharapkan agar partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontotiro dalam pengimplementasian program bantuan inpres SD tidak hanya terbatas pada masalah tenaga melainkan juga dapat bersipat materil, seperti untuk membantu pemerintah dalam penyediaan lokasi proyek.
3. Dengan adanya bantuan inpres SD diharapkan agar dana bantuan dapat dimanfaatkan sebagaimana

mestinya sehingga tidak mengurangi mutu proyek tersebut.

4. Diharapkan agar faktor pengawasan di dalam pengimplementasian program inpres SD. lebih di tingkatkan lagi, sebab pengawasan sangat berpengaruh terhadap mutu proyek itu sendiri.
5. Demi tercapainya penyelenggaraan implementasi program bantuan inpres SD, diharapkan agar faktor geografi Daerah lebih diperhatikan pengaruhnya terhadap proyek yang akan dibangun.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Muh. Syukur, 1988, Perkembangan dan Penerapan Study Implementasi, UNIV, Hasanuddin Ujung Pandang.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1976, Dasar-dasar Manajemen dan Office Management, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djamaluddin Arif, 1982, Sistim Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Darminta, Porwa, W.J.S, 1987, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, RI, 1981, Manual Administrasi Barang Daerah, Jakarta, Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah.
- Musanef, 1986, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung.
- Munawir, S, 1983, Analisa Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Soemita, AK, 1981, Management Keuangan, Sinar Baru, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1981, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- The Liang Gie, 1980, Administrasi Perkantoran Moderen, Nurcahaya, Yogyakarta.

B. BUKU METODOLOGI

- Singarimbun, Masri, dan Soppian Efendi, 1981, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP/ES.
- Surahmad M. Syukur, 1988, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, Bandung : Tarsito.

C. DOKUMEN-DOKUMEN

TAP MPR. NO. II/MPR/1988, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 83 Tahun 1984, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan.

Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Instruksi Presiden RI. Nomor VI Tahun 1984, Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat II dan Desa Dirjen Bangdes dan Departemen Dalam Negeri.

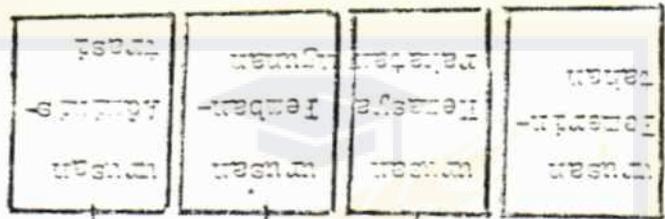


BOSOWA

INVESTASI

KELOMPOK
KAWASAN PERINDUSTRIAN

YSEC
/KAWASAN PERINDUSTRIAN



UNIVERSITAS
BOSQUA
 DEPARTEMEN
 STATISTIKA

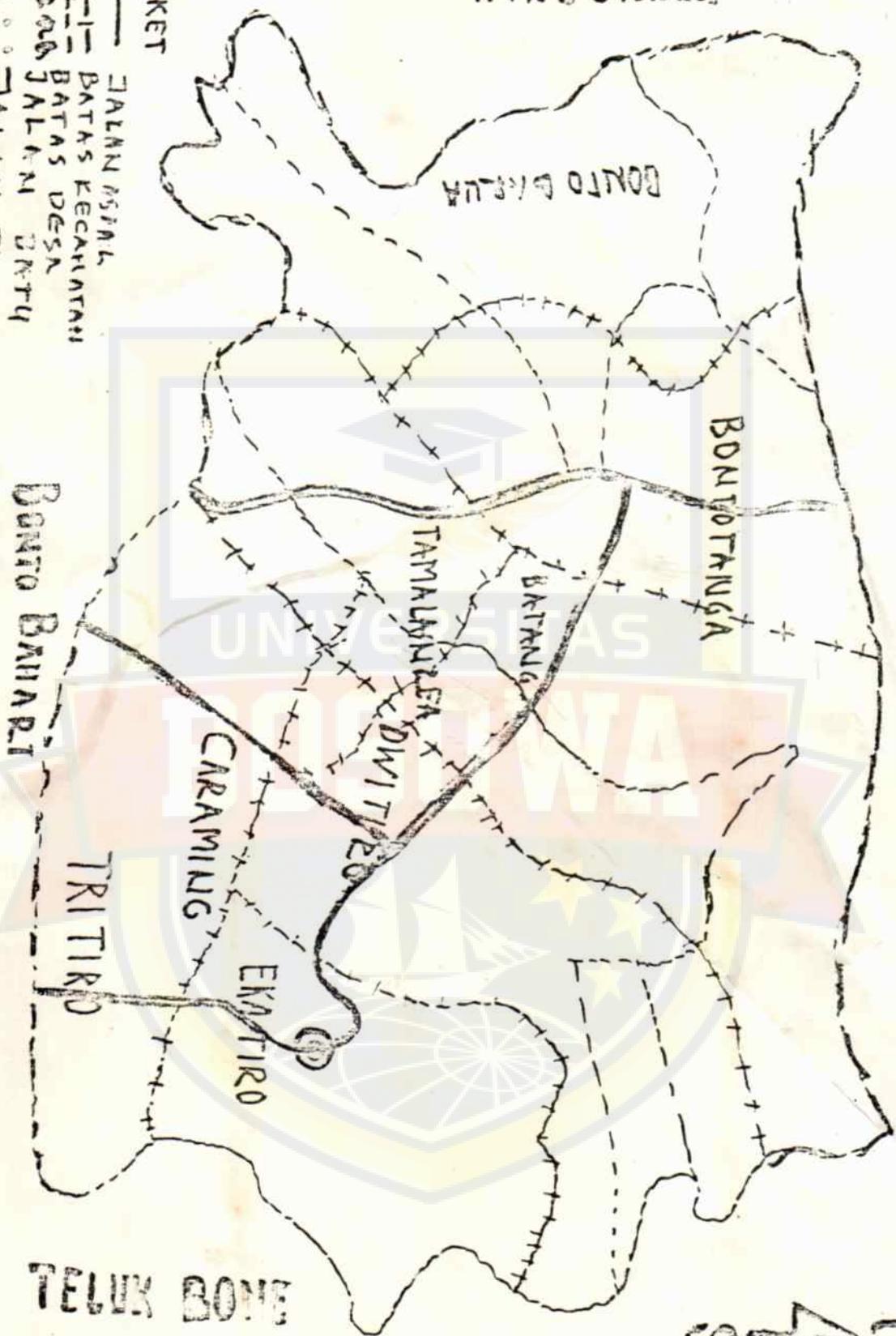
YAYASAN
INDONESIA

0 1 1 1 0

NO : 82. 44 : 1984
 DEPARTEMEN STATISTIKA
 FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS BOSQUA

KECAMATAN BONTOTIRO

BUNG BULU



U
T
S